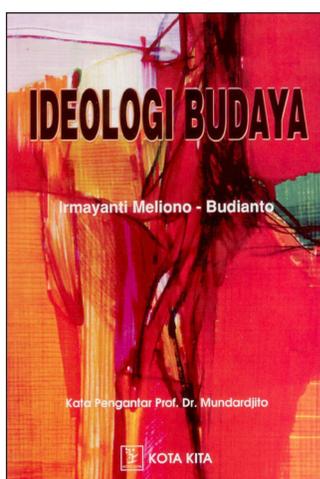


## TINJAUAN BUKU

### MEMBACA IDEOLOGI DALAM BUDAYA

Irmayanti Meliono-Budianto. *Ideologi Budaya* (Jakarta: Kota Kita, 2004), viii + 157 halaman.



Manneke Budiman  
*Program Studi Inggris, Fakultas Ilmu Pengetahuan  
Budaya  
Universitas Indonesia*

Membaca *Ideologi Budaya* karya Irmayanti Budianto serasa masuk ke dalam kepekatan dunia filosofis yang tanpa batas, tetapi yang mencoba untuk dapat menemukan pijakan cukup solid dalam kekonkretan dunia material. Di satu pihak, buku ini secara komprehensif menguraikan Ricoeur, Dilthey, Barthes, dan Peirce dengan segala kecanggihan ataupun kompleksitas konseptualnya. Di pihak lain, ia juga tak henti-hentinya berupaya mencari jalan bagaimana berbagai konsep kompleks dan canggih itu dapat dibumikan atau dibaca dan dipahami tanpa justru semakin mengukuhkan isoterisme yang selama ini melingkupi dunia filsafat.

Hal ini sedikit banyak juga berkorelasi dengan dua isu besar yang hendak dijelajahi oleh buku ini, yakni *ideologi* pada satu sisi dan *kebudayaan* pada sisi yang lain. Ideologi menempati ruang abstrak dan hanya dapat dimanifestasikan dalam kebudayaan, sementara kebudayaan, selain menjadi kendaraan bagi ideologi untuk melakukan materialisasi, juga merupakan arena tempat ideologi-ideologi saling berbenturan. Barangkali, ini sebabnya mengapa Irmayanti Budianto berusaha keras untuk mempertemukan kedua dunia itu: dunia abstrak yang hanya dapat didekati dengan filsafat sebagai pintu masuknya dan dunia material tempat berbagai abstraksi menemukan dagingnya. Untuk dapat mengatakan sesuatu tentang ideologi dalam budaya, tiada pilihan lain kecuali menghadirkan keduanya dalam interaksi.

Tidak mudah untuk menilai apakah dalam kerja yang pelik ini Irmayanti berhasil atau gagal. Ada beberapa titik terang yang memungkinkan kita dapat menyaksikan persinggungan di antara kedua dunia, tetapi juga ada jurang-jurang atau kesenjangan-kesenjangan yang jembatan penghubungnya masih memerlukan kerja lebih keras lagi untuk dibangun. Bayangan awal saya ketika

membaca judul buku ini adalah sekumpulan tulisan yang memperlihatkan bagaimana kebudayaan menggunakan berbagai bentuk dan perilaku kultural untuk mewujudkan dirinya sambil, pada saat yang sama, tidak membuat pelaku atau penganut budayanya sadar bahwa ada ideologi yang sedang mengalami metamorfosis di situ. Saya juga berharap bahwa bermacam problematika yang lahir akibat proses-proses tersebut juga akan memperoleh ruang untuk didalami.

Sebagian dari harapan itu terpenuhi. Dengan modal pengetahuan yang elementer tentang apa itu filsafat, ideologi, dan kebudayaan, aliran pemikiran Irmayanti dapat diikuti, tetapi aliran ini bukanlah suatu proses yang tanpa batu sandungan. Dengan latar belakang berbasis ilmu filsafat, Irmayanti cukup fasih menuturkan gagasan-gagasan filsafat yang menjadi tulang-punggung pendekatannya, seperti hermeunetika dan semiotika. Persoalannya mungkin terletak pada sejauh mana peranti-peranti konseptual itu dapat dibumikan dalam naratif agar pembaca dengan modal minim tetap dapat menikmati aliran gagasan serta demonstrasinya dalam mendekati yang material.

Misalnya, dalam diskusi tentang meditasi, yang mencoba menjelaskan meditasi dari perspektif filsafat, kita dicerahkan mengenai banyak hal yang di kalangan para filsuf tak lagi jadi persoalan, seperti *ontologi* dan *metafisika*, tetapi yang bagi orang awam bisa menimbulkan pusing kepala. Namun, bagaimana praktisnya meditasi secara sederhana dan gamblang bisa diterangkan dalam konteks kedua tataran itu masih meninggalkan beberapa sudut gelap. Ada pernyataan seperti “perilaku budaya yang sesungguhnya dapat dicapai apabila terjadi harmoni antara manusia secara rohaniah dan badaniah, secara substansial-esensial dan eksistensial” menuju terbentuknya “manusia seutuhnya”, yang sulit dipahami dalam tataran konkret. Padahal, kuncinya terletak pada bagaimana gagasan filosofis dapat dikisahkan dengan bahasa yang lugas sehingga meditasi yang secara kasat mata dapat diamati tetapi mengandung kedalaman makna itu dapat diceritakan, bagaikan seorang kaisar yang punya aura mitis dan berkedudukan mulia, tetapi tampil telanjang di hadapan publiknya. Semua orang, tuan maupun hamba, bisa melihat ketelanjangan sang kaisar dengan gamblang.

Demikian pula dengan pernyataan seperti “seseorang haruslah terlebih dulu memahami atau mengerti untuk menafsirkan sesuatu”. Dua hal itu bukanlah keadaan yang saling terpisah, tetapi sekaligus merupakan suatu proses yang terjadi secara serentak. Jelas hal-hal semacam ini butuh pendalaman lebih lanjut karena konsep-konsep seperti *memahami*, *mengerti*, dan *menafsirkan* dalam filsafat mempunyai muatan lebih daripada apabila istilah-istilah itu keluar dari mulut seorang awam. Apa yang sudah jelas dan tak lagi perlu dipersoalkan atau diterangkan bagi seorang filsuf tak jarang menjadi pertanyaan yang tak terjawab seumur hidup bagi orang kebanyakan yang memandang filsafat sebagai sebuah dunia asing dan jauh. Di sini, kita tidak sedang berhadapan dengan dikotomi antara *erklären* dan *verstehen*, melainkan suatu situasi ketika *erklären* menjadi prasyarat bagi *verstehen* agar buku ini dapat diakses lebih banyak orang.

Persoalan lain, yang bisa jadi bukan suatu persoalan tetapi, lebih tepatnya, hal menarik untuk disaksikan dalam buku ini, adalah rembesan “ideologi” penulis sendiri ke dalam teks-teksnya, yang di permukaan tampaknya sedang berbicara tentang ideologi-ideologi lain. Kita dapat sekelumit menyaksikan hal ini ketika penulis menyatakan perilaku bermakna akan tercermin apabila perilakunya tidak merugikan orang lain, berguna bagi orang lain, sedangkan perilaku yang tidak bermakna akan muncul apabila perilaku manusia tersebut merugikan orang lain atau menyebabkan orang lain menderita (hlm. 10). Ada muatan moral yang cukup sarat dalam kutipan itu, yang menjauhkan kita dari upaya menempatkan meditasi dalam persilangan antara ontologi dan metafisika. Bisa jadi, ini bukan murni suara penulis; bisa jadi, ini suara banyak filsuf dari berbagai zaman yang membangun sebuah diskursus tertentu dalam kesadaran penulis, tetapi ungkapan-ungkapan moralistik seperti ini bisa menimbulkan kecurigaan-kecurigaan atas bias pribadi penulis sendiri.

Pemilihan Ricoeur sebagai paradigma untuk memahami ideologi budaya juga bisa menimbulkan suatu pertanyaan karena ia berbicara tentang kejahatan, misalnya, dari perspektif agama beserta aspek-aspeknya, seperti noda, dosa, dan salah (hlm. 52). Meskipun tidak begitu kentara, aspek-aspek moral dan agama sepertinya cukup konsisten melatarbelakangi banyak cara pandang dan penilaian dalam beberapa esei di buku ini. Pendekatan terhadap budaya dari aspek-aspek moral-religius ini berisiko menyempitkan pemahaman tentang budaya melulu sebagai suatu aspek kehidupan yang lebih berdekatan dengan yang abstrak daripada yang material. Sebagaimana telah saya utarakan pada awal tulisan ini, pendekatan seperti ini mungkin belum memadai, terlebih ketika kita hendak bicara bukan hanya soal ideologi tetapi juga soal budaya karena, sekali lagi, budaya adalah tempat ideologi mematerialisasikan diri.

Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu cara pandang dan pendekatan yang dapat menyentuh materialitas ideologi itu. Membiarkan perspektif moral dan religi mendominasi gagasan-gagasan tentang kebudayaan dapat mengarah kepada suatu hasil yang kontraproduktif: ideologi tidak berhasil dibumikan lewat kebudayaan, yang dipahami sebagai suatu peristiwa material. Sebaliknya, kebudayaan menjadi terjerat oleh abstraksi ideologis yang menungganginya dan tercerabut dari materialitasnya. Dalam keadaan demikian, jangan-jangan hanya para filsuf dan ilmuwan filsafat saja yang dapat mengikuti paparan-paparan metafisis dalam buku ini, sedangkan pembaca awam yang hanya dapat berkecimpung pada tataran ontologis terancam gagal memperoleh pencerahan. Apakah ini memang jebakan ilmu filsafat ataukah kesulitan umum yang cenderung dihadapi para filsuf setiap kali mereka hendak bicara soal kehidupan manusia yang banal dan sehari-hari, sebagaimana yang tercermin, misalnya, dalam kebudayaan populer?

Semoga ini bukan efek samping hasrat yang kuat untuk “menembus kesadaran manusia” lewat simbolisme serta, pada saat yang sama, kehendak untuk menghindarkan diri dari jebakan “kesadaran naif”. Ada terbersit kesan seolah-olah “membumi” sama dengan membiarkan diri jatuh ke dalam

profanitas yang, siapa tahu, tidak dinilai cukup tinggi untuk ditengok, apalagi diutak-utik secara serius, oleh ilmu filsafat. Secara longgar, dari perspektif Ricoeur, jangan-jangan membumikan filsafat akan menyebabkan jatuhnya para filsuf ke dalam “noda” dan “dosa”, serta menyebabkan munculnya rasa bersalah. Menarik untuk mengikuti pemaknaan Irmayanti atas iklan air mineral Equil, misalnya, yang melukiskan sepasang laki-laki dan perempuan saling menjaga keseimbangan dalam posisi tertentu. Penulis membaca setiap penanda dalam gambar iklan dan mencoba membawa makna-makna itu ke tataran simbolik (mungkin agar tidak terjatuh ke dalam perangkap “kesadaran naif”), tetapi ia “lupa” menyebutkan satu hal yang mencolok dalam gambar itu: pasangan laki-laki dan perempuan itu telanjang (hlm. 80–81). Seandainya profanitas tidak diharamkan, ketelanjangan ini, “materialitas” ini, akan dapat mengungkapkan sesuatu yang mungkin saja amat penting bagi pemahaman kita atas fenomena budaya itu.

Ini bukan hanya suatu kebetulan. Kecenderungan untuk tidak “menerangkan” (*erklären?*) dan, dengan demikian, tidak memberikan “pemahaman” (*verstehen?*) atas yang profan, juga muncul dalam beberapa tulisan lain. Dalam pembahasan atas iklan kartu kredit *gold card* (hlm. 84–85), penulis mengedepankan kontradiksi yang dihasilkan oleh benturan antara penanda *bulan puasa* (hari raya keagamaan) dan *konsumsi* (promosi merek mobil), serta kebingungan yang ditimbulkannya pada pembaca iklan. Padahal, bila saja penanda-penanda itu dipahami dalam kerangka kebudayaan sebagai peristiwa material, akan ada koherensi gagasan, dan kebingungan tidak perlu terjadi. Apa yang dari perspektif religius dinilai sakral (puasa, menahan diri, ibadah) dalam konteks kebudayaan populer menjelma menjadi alat-alat konsumsi atau mengalami komodifikasi. Dalam dunia profan seperti ini tak ada satu pun yang begitu sakralnya sehingga tak dapat dijadikan komoditas.

Sayangnya, dalam kerangka pemikiran Irmayanti, pernyataan yang kemudian muncul adalah, “...pelaku budaya yang berkaitan dengan pemilik modal diharapkan tidak memberikan citra negatif... karena terlalu ‘komersial’, ‘hedonistis’, dan ‘membangun impian-impian yang sebenarnya jauh dari kenyataan yang sebenarnya’” (hlm. 90), atau pada halaman lain, “...sebaiknya iklan-iklan televisi yang mengandung tema kekerasan dihilangkan atau ditarik—ditinjau kembali peredarannya” (hlm. 110). Di dalam upaya mempertahankan ketinggian metafisika ilmu filsafatnya, seorang ilmuwan atau praktisi ilmu filsafat perlu menjaga diri agar tidak malah terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran atau solusi-solusi moralistis seperti yang tampak dalam contoh-contoh tersebut. Bila hal ini dibiarkan terjadi, filsafat bisa menjelma menjadi polisi moral dan superioritas keilmuannya tak lagi dimanfaatkan untuk mempromosikan pluralisme dalam berpikir dan berkreasikan, melainkan menjadi aparatus sensor atas ekspresi.

Memang benar, seperti dinyatakan oleh penulis,

...apabila media budaya baik media cetak maupun media elektronik tidak didukung oleh kesadaran manusia yang memiliki nilai moral dan etika yang baik akan terjebak dalam alam kapitalisme baru yang sangat mementingkan kuantitas produksi, keserakahan dan kekuasaan. (hlm. 133),

dan sebagai sebuah pengandaian, pendapat seperti ini sah saja, walaupun ini juga berisiko mengecilkan filsafat sebagai sebuah pintu menuju kebenaran. Namun, bagaimana jika apa yang dikhawatirkan itu bukan lagi sebuah pengandaian, tetapi telah menjadi kenyataan? Solusi normatif seperti di atas justru dapat menumpulkan kemampuan ilmu pengetahuan untuk menyikapi realitas dan perkembangan. Kembali ke gagasan tentang *verstehen* dan *erklären*, mungkin yang perlu dilakukan adalah mendekati fenomena semacam itu dengan kehendak untuk menerangkan dan memahami daripada melakukan penilaian moral. Inilah tantangan utama ilmu pengetahuan, terlebih-lebih filsafat, dalam berhadapan-hadapan dengan fenomena material atau realitas.

Meskipun demikian, buku *Ideologi Budaya* ini merupakan lahan latihan yang sangat baik bagi pembaca yang ingin berkuat dengan berbagai macam pemikiran yang terkait dengan tafsir dan pemaknaan, dengan hermeneutika dan semiotika. Gagasan-gagasan Irmayanti dapat dipandang sebagai pancingan bagi respons kritis pembaca dan, dengan demikian, buku yang ditulisnya ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang baik pula. Sebuah buku yang sarat dengan gagasan-gagasan problematis selalu mencerdaskan dan mencerahkan karena ia membuka pintu-pintu dialog dengan pembacanya, dan juga karena penulisnya tampil jujur, tak berpretensi, menuangkan segala kelebihan dan kekurangannya.

Dialog antara filsafat dan kebudayaan populer perlu dilanjutkan sebagai bagian dari agenda lebih besar untuk mempertemukan yang ideal dengan yang material, sehingga ilmu pengetahuan dapat selalu berkembang. Ada banyak pintu yang telah dibuka menuju kajian-kajian ideologi dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan populer, dan ada peluang besar untuk pendalaman-pendalaman dan melanjutkan langkah-langkah awal yang telah dirintis. Setiap pemahaman baru yang lebih mendalam yang diraih dalam bergulat dengan berbagai fenomena pada gilirannya juga akan memperkaya pemahaman atas fenomena-fenomena itu. Seperti kata Irmayanti sendiri dalam salah satu esainya, "Seseorang haruslah terlebih dahulu memahami atau mengerti untuk menafsirkan semua."

#### CINA PERANAKAN INDONESIA: ANTARA MITOS DAN REALITAS

Tim Lindsay dan Helen Pausacker (ed.). *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. (Australia: Monash University Press, 2005), xvi + 215 halaman.

**Dwi Woro Retno Mastuti**

*Program Studi Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia*